

KEBIJAKAN PEMERITAH DAN PENGELOLAAN DESTINASI KAWASAN PUNCAK DALAM MENJAWAB TANTANGAN OVERTOURISM DAN TRANSFORMASI DIGITAL

Muhamad Andriana^{1*}, Budi Setiawan²

¹Perencanaan dan Pengembangan Pariwisata, Politeknik Sahid Jakarta,

²Prodi Pariwisata Universitas Pradita

Korespondensi : asaftha55@gmail.com

Diajukan 03-09-2025	Direvisi 16-10-2025	Diterima 22-10-2025
------------------------	------------------------	------------------------

ABSTRACT

The Puncak area of Bogor is one of Indonesia's most popular tourist destinations, representing the paradox of modern tourism. On one hand, it contributes significantly to regional economic growth, generates employment opportunities, and strengthens local cultural identity. On the other hand, its high popularity has led to serious issues such as chronic traffic congestion, environmental degradation, and reduced visitor comfort. This condition reflects a classic case of overtourism, in which visitor numbers exceed the destination's carrying capacity.

Purpose: This study aims to analyze how government policies and destination management strategies respond to the challenges of overtourism in the Puncak area, particularly in the context of accelerating digital transformation in the post-pandemic era.

Research Methods: This research employs a literature review method with a qualitative approach. Data were collected through the examination of academic literature, official policy documents, and publications from international organizations from 2020-2025, and analyzed descriptively to identify patterns of policy and destination management practices. The findings indicate that local governments have implemented digital-based policies, including online visitor registration systems, zoning arrangements for tourism areas, and multi-stakeholder governance through the Destination Management Organization (DMO) model. At the operational level, destination managers have adopted e-ticketing systems, online queuing systems, and big data utilization to monitor tourist flows. However, digital literacy gaps and limited technological access among local MSMEs remain major challenges that may lead to unequal benefits.

Implications: This study emphasizes that tourism sustainability in the Puncak area cannot rely solely on regulations or technological innovations. An integrated approach is required combining adaptive government policies, inclusive destination management, and digital transformation that prioritizes social equity and environmental balance. Such synergy will determine the future of Puncak as both a competitive and sustainable tourism destination.

Keywords : Government Policy, Destination Management, Overtourism, Digital Transformation.

ABSTRAK

Kawasan Puncak Bogor merupakan salah satu destinasi wisata paling populer di Indonesia yang sekaligus mencerminkan paradoks pariwisata modern. Di satu sisi, kawasan ini berkontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, menciptakan lapangan kerja, serta memperkuat identitas budaya lokal. Namun, di sisi lain, tingginya popularitas Puncak justru melahirkan persoalan serius berupa kemacetan kronis, penurunan kualitas lingkungan, serta berkurangnya kenyamanan wisatawan. Kondisi ini menunjukkan gejala klasik overtourism, yaitu ketika jumlah kunjungan melebihi daya dukung destinasi.

Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana kebijakan pemerintah dan strategi

pengelolaan destinasi merespons tantangan overtourism di Kawasan Puncak, khususnya dalam konteks percepatan transformasi digital pasca pandemic

Metode Penelitian: Penelitian ini menggunakan metode kajian pustaka dengan pendekatan kualitatif. Data dikumpulkan melalui telaah literatur akademik, dokumen kebijakan resmi, serta publikasi organisasi internasional periode 2020-2025, kemudian dianalisis secara deskriptif untuk mengidentifikasi pola kebijakan dan praktik pengelolaan destinasi. Hasil kajian menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah menerapkan kebijakan berbasis digitalisasi, antara lain melalui sistem registrasi kunjungan daring, penerapan zonasi ruang wisata, serta tata kelola berbasis kolaborasi multipihak melalui model Destination Management Organization (DMO). Di sisi operasional, pengelola destinasi telah mengadopsi tiket elektronik, sistem antrian daring, serta pemanfaatan big data untuk memantau arus wisatawan. Meski demikian, kesenjangan literasi digital dan keterbatasan akses teknologi bagi UMKM lokal masih menjadi tantangan besar yang berpotensi menimbulkan ketimpangan manfaat.

Implikasi: Penelitian ini menegaskan bahwa keberlanjutan pariwisata di Kawasan Puncak tidak cukup ditopang oleh regulasi atau inovasi teknologi semata. Diperlukan pendekatan terpadu yang menggabungkan kebijakan pemerintah yang adaptif, pengelolaan destinasi yang inklusif, serta transformasi digital yang berpihak pada keadilan sosial dan keseimbangan lingkungan. Sinergi inilah yang akan menentukan masa depan Puncak sebagai destinasi wisata yang kompetitif sekaligus berkelanjutan.

Kata kunci: Kebijakan Pemerintah, Pengelolaan Destinasi, Overtourism, Transformasi Digital.

PENDAHULUAN

Pariwisata dalam lima tahun terakhir terus menjadi sektor andalan pembangunan ekonomi nasional maupun daerah. Kontribusinya tidak hanya pada peningkatan Produk Domestik Bruto (PDB) dan penciptaan lapangan kerja, tetapi juga sebagai sarana penguatan identitas budaya dan diplomasi antarbangsa. Namun, pertumbuhan pariwisata juga menghadirkan tantangan besar berupa degradasi lingkungan, tekanan pada infrastruktur, serta kesenjangan manfaat ekonomi antar pelaku. Fenomena ini menuntut adanya arah kebijakan pariwisata yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan jumlah kunjungan, tetapi juga memperhatikan prinsip keberlanjutan dan keadilan sosial (Mason et al., 2021).

Pandemi COVID-19 menjadi titik balik penting bagi sektor pariwisata di seluruh dunia. Kawasan wisata yang selama ini bergantung pada kunjungan massal mendapati dirinya rentan terhadap guncangan eksternal. Situasi ini memaksa pemerintah untuk merumuskan kebijakan baru yang menekankan pada diversifikasi produk, penguatan wisata domestik, serta percepatan transformasi digital. Studi mutakhir menunjukkan bahwa kebijakan pariwisata pasca-pandemi semakin menekankan ketahanan (resilience) destinasi dan perlunya kolaborasi multipihak dalam tata kelola (Zenker & Kock et al., 2023).

Dalam konteks Indonesia, kawasan puncak bogor merupakan contoh nyata destinasi dengan tingkat popularitas yang tinggi namun sarat dengan masalah overtourism. Kemacetan kronis, polusi, dan tekanan terhadap daya dukung lingkungan menjadi isu utama yang terus berulang setiap musim liburan. Pemerintah daerah dan Kementerian Pariwisata serta Ekonomi Kreatif merespons dengan kebijakan berbasis digital, seperti registrasi kunjungan daring, sistem manajemen lalu lintas berbasis data, serta promosi transportasi publik. Pendekatan ini selaras dengan kebijakan nasional 2020-2024 yang menekankan pentingnya digitalisasi dan keberlanjutan pariwisata (Kemenparekraf et al., 2023).

Selain kebijakan pemerintah, pengelolaan destinasi oleh pelaku lokal menjadi kunci dalam menjaga keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan kelestarian lingkungan. Pengelola destinasi di Puncak mulai mengadopsi inovasi seperti tiket elektronik, sistem antrian digital, dan aplikasi panduan berbasis teknologi. Namun, kesenjangan digital masih menjadi hambatan, terutama bagi pelaku UMKM dan penginapan kecil yang belum sepenuhnya siap dengan

teknologi baru. Literasi digital dan pendampingan usaha menjadi kebutuhan mendesak agar transformasi pariwisata tidak menimbulkan marginalisasi terhadap masyarakat lokal (OECD et al., 2023).

Dengan demikian, perumusan kebijakan pemerintah dan praktik pengelolaan destinasi wisata di tahun 2025 perlu diarahkan pada keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, keadilan sosial, dan keberlanjutan lingkungan. Kawasan Puncak Bogor menghadirkan contoh bagaimana kebijakan berbasis data, inovasi digital, dan tata kelola inklusif dapat menjawab tantangan overtourism. Namun, keberhasilan kebijakan ini sangat bergantung pada sejauh mana pemerintah dan pengelola destinasi mampu menghadirkan model pengelolaan yang kolaboratif, inklusif, dan adaptif terhadap perubahan global (UNWTO et al., 2021).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kajian pustaka (literature review) dengan pendekatan kualitatif. Kajian pustaka dipilih karena mampu menggali, mengidentifikasi, dan menganalisis secara kritis tren, kebijakan, serta praktik pengelolaan destinasi dari berbagai sumber akademik maupun kebijakan resmi. Sumber data terdiri data primer dan data sekunder. Data primer diambil dari hasil observasi dan wawancara mendalam. Data sekunder diambil dari artikel jurnal ilmiah, laporan kebijakan pemerintah, serta publikasi organisasi internasional pada periode 2019-2025, yang relevan dengan isu overtourism, transformasi digital, dan tata kelola destinasi pariwisata. Analisis dilakukan secara tematik untuk menemukan pola dan hubungan antar konsep, seperti arah kebijakan pariwisata, praktik pengelolaan destinasi, serta dampaknya terhadap keberlanjutan. Metode ini dipandang sesuai karena dapat memberikan gambaran komprehensif tentang dinamika kebijakan pariwisata kontemporer tanpa harus melakukan penelitian lapangan. Pendekatan kajian literatur juga direkomendasikan dalam penelitian pariwisata kontemporer, terutama dalam merumuskan arah kebijakan yang berbasis bukti (Bramwell & Lane et al., 2023). (1). Sumber data dalam penelitian ini berasal dari dua kategori utama yaitu hasil observasi langsung dan literatur ilmiah, yang meliputi jurnal akademik, artikel riset dan buku yang membahas tentang kebijakan pemerintah dalam pengelolaan destinasi berkelanjutan, (2). Teknik analisa data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan tematik. Data yang di peroleh dari studi pustaka dan observasi di kategorikan berdasarkan tema-tema utama yang relevan dengan kebijakan pemerintah dalam pengelolaan destinasi kawasan wisata. Teknis analisis data yaitu secara kualitatif tematik dengan mereduksi data, mengelompokkan dalam tema kemufian menarik kesimpulan berdasarkan pola yang muncul.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam konteks kawasan Puncak, kebijakan publik yang efektif perlu bergerak dari sekadar menambah pasokan infrastruktur menuju tata kelola permintaan berbasis data. Instrumen kunci yang relevan adalah zonasi fungsional (ekowisata, agrowisata, komersial, konservasi), kuota dan time-slot kunjungan pada titik rawan padat, tiket terintegrasi lintas-atraksi yang tersambung ke moda transportasi umum, serta rekayasa lalu lintas berbasis sistem cerdas (dynamic traffic management) yang tersinkron dengan aplikasi navigasi. Kebijakan disinsentif kendaraan pribadi pada jam puncak, penertiban

parkir liar dengan sanksi progresif, dan retribusi berbasis volume yang dialokasikan kembali (earmarking) untuk konservasi dan peningkatan layanan publik, makin penting untuk mengatasi eksternalitas overtourism. Secara institusional, harmonisasi RTRW/RDTR dengan rencana pengelolaan destinasi dan indikator kinerja kebijakan misalnya tingkat kepuasan pengunjung, rata-rata lama tinggal, emisi per kunjungan, dan sebaran pergerakan membantu evaluasi berbasis bukti. Arah ini sejalan dengan rekomendasi internasional tentang transformasi digital, keberlanjutan, dan resiliensi, serta prioritas nasional 2020–2024 mengenai penguatan pasar domestik dan digitalisasi layanan wisata (OECD et al., 2023).

Kebijakan Digitalisasi sebagai Instrumen Pengendalian

Salah satu inovasi kebijakan di Kawasan Puncak adalah penerapan registrasi kunjungan daring pada titik-titik wisata populer, seperti Gunung Mas dan Telaga Warna. Sistem ini berfungsi untuk mengatur kapasitas kunjungan harian dan mencegah kepadatan berlebih. Selain itu, Pemerintah Kabupaten Bogor bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Kemenparekraf menerapkan rekayasa lalu lintas digital yang terintegrasi dengan aplikasi navigasi. Digitalisasi ini sejalan dengan strategi global yang menekankan pemanfaatan teknologi untuk pengelolaan destinasi, termasuk big data, artificial intelligence, dan aplikasi pintar yang mendukung pengendalian kunjungan (OECD et al., 2023).

Dalam konteks kawasan Puncak, pengelolaan destinasi tidak hanya bergantung pada kebijakan publik dan penerapan teknologi digital, tetapi juga pada peran masyarakat lokal dalam memperkuat daya tarik wisata. Salah satu strategi yang dapat diadopsi adalah pengembangan homestay berbasis komunitas, sebagaimana ditunjukkan oleh Vany, Priscillia, Arifin, Deo, dan Setiawan (2024), yang dapat meningkatkan kapasitas akomodasi sekaligus mendorong distribusi manfaat ekonomi secara lebih merata. Selain itu, praktik komunikasi pemasaran terpadu terbukti efektif dalam menciptakan nilai pengalaman bagi wisatawan dan meningkatkan minat kunjung ulang, yang relevan bagi destinasi seperti Puncak yang menghadapi tantangan overtourism (Setiawan et al., 2023). Tidak kalah penting, penguatan brand produk UMKM lokal menjadi instrumen strategis untuk memperkuat identitas destinasi serta memberikan peluang ekonomi baru bagi masyarakat sekitar (Kurniadjaya et al., 2024). Dengan demikian, pengelolaan Puncak perlu memadukan inovasi kebijakan, digitalisasi, serta pemberdayaan komunitas dan UMKM agar dapat mencapai keberlanjutan yang inklusif.

Di tingkat operasional, pengelola destinasi di Puncak perlu mengadopsi crowd management end to end mulai dari time ticketing, reservasi daring, antrian digital, hingga dynamic pricing untuk meratakan puncak kunjungan. Pengelolaan berbasis data stewardship (dashboard real-time okupansi, heat-map mobilitas, dan prediksi arus) memungkinkan intervensi cepat, sekaligus mendukung komunikasi pra-kunjungan agar wisatawan menyesuaikan waktu kedatangan dan moda transportasi. Penerapan operasi hijau manajemen sampah terpadu, pembatasan plastik sekali pakai, efisiensi air-energi, serta preferensi pemasok lokal perlu diikat ke SLA/standar destinasi dan dimonitor melalui KPI keberlanjutan (mis. Sustainable Tourism Visitor Index lokal). Agar

transformasi digital inklusif, pengelola bersama DMO menyusun program onboarding UMKM (pelatihan literasi digital, katalog bersama, payment gateway, dan paket kurasi) berikut mekanisme bagi hasil yang adil dan grievance mechanism untuk komunitas. Praktik ini sesuai dengan kerangka keadilan dan etika pariwisata

Peran Destination Management Organization (DMO) dalam Tata Kelola

Model Destination Management Organization (DMO) mulai diperkenalkan di Puncak sebagai wadah koordinasi multipihak. DMO mempertemukan pemerintah, swasta, akademisi, dan komunitas lokal dalam merumuskan strategi bersama. Peran DMO terbukti mampu meningkatkan efektivitas pengelolaan destinasi, terutama dalam menghadapi kompleksitas overtourism. Di tingkat internasional, DMO menjadi instrumen penting dalam menyatukan kepentingan antaraktor dan menghindari tumpang tindih kebijakan. Namun, keberhasilan DMO tetap bergantung pada komitmen politik, kapasitas kelembagaan, dan partisipasi masyarakat lokal (Bramwell & Lane et al., 2023).

Overtourism sebagai Isu Strategis Kawasan Puncak

Kawasan Puncak Bogor menghadapi permasalahan klasik berupa kemacetan, kepadatan wisatawan pada akhir pekan, dan degradasi lingkungan. Fenomena overtourism ini tidak hanya berdampak pada kenyamanan wisatawan, tetapi juga menurunkan kualitas hidup masyarakat lokal. Overtourism menuntut kebijakan pengelolaan daya dukung yang lebih tegas, seperti sistem kuota kunjungan, zonasi destinasi, serta promosi destinasi alternatif di sekitar Puncak. Studi di berbagai destinasi dunia menunjukkan bahwa tanpa intervensi kebijakan yang tepat, overtourism dapat mengancam daya tarik destinasi secara jangka panjang (Seraphin et al. et al., 2023). Selain pengendalian overtourism, keberlanjutan menjadi fokus utama dalam pengelolaan Puncak. Kebijakan zonasi yang membagi wilayah ke dalam area ekowisata, agrowisata, komersial, dan konservasi merupakan upaya untuk menjaga daya dukung lingkungan sekaligus mendorong penyebaran wisatawan ke area alternatif. Tren terbaru dalam literatur pariwisata menekankan pentingnya transisi dari pariwisata berkelanjutan menuju pariwisata regeneratif, yang tidak hanya mengurangi dampak negatif tetapi juga memperbaiki kondisi ekologi dan sosial. Hal ini penting bagi kawasan Puncak yang menghadapi tekanan pembangunan dan urbanisasi (Higgins-Desbiolles, 2020; UNWTO, 2023; WTTC, 2023)

Transformasi Digital dalam Praktik Pengelolaan Destinasi

Dari sisi pengelola destinasi, digitalisasi mulai diterapkan melalui tiket elektronik, sistem antrean digital, dan aplikasi panduan wisata berbasis teknologi. Praktik ini tidak hanya meningkatkan efisiensi layanan, tetapi juga menghasilkan data penting terkait perilaku pengunjung yang berguna untuk perencanaan. Namun, kesenjangan digital masih menjadi kendala utama, karena sebagian pelaku UMKM dan penginapan kecil belum memiliki kemampuan dan sumber daya untuk beradaptasi dengan teknologi baru. Hal ini menunjukkan perlunya kebijakan literasi digital yang inklusif agar transformasi

teknologi tidak memperlebar ketimpangan (UNWTO et al., 2023). Meskipun digitalisasi dan kebijakan zonasi menunjukkan kemajuan, tantangan terbesar adalah memastikan inklusivitas. Banyak pelaku lokal merasa tertinggal dalam mengakses teknologi maupun pasar wisata. Tanpa intervensi berupa pelatihan, subsidi teknologi, dan pendampingan bisnis, terdapat risiko marginalisasi masyarakat lokal. Kasus serupa terjadi di berbagai destinasi dunia, di mana digitalisasi justru memperbesar dominasi pelaku usaha besar. Oleh karena itu, keberhasilan kebijakan pemerintah dan praktik pengelolaan destinasi sangat ditentukan oleh sejauh mana inklusivitas dijaga (Jamal & Higham, 2021; UNWTO, 2021; WTTC, 2023).

KESIMPULAN

Hasil kajian menunjukkan bahwa masa mendatang kawasan Puncak sebagai destinasi wisata sangat bergantung pada kombinasi kebijakan publik yang adaptif dan pengelolaan destinasi yang inovatif. Kebijakan digitalisasi, zonasi, dan penguatan DMO menjadi langkah progresif, namun harus disertai dengan strategi jangka panjang untuk meningkatkan kapasitas lokal. Jika keberlanjutan, inklusivitas, dan keadilan sosial dapat diintegrasikan, maka Puncak berpotensi menjadi model pengelolaan destinasi yang mampu menjawab tantangan global pariwisata. Dengan demikian, Hasil dan Pembahasan ini menegaskan bahwa kolaborasi antara pemerintah dan pengelola destinasi merupakan kunci untuk memastikan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, keberlanjutan lingkungan, dan kesejahteraan masyarakat lokal (UNWTO et al., 2023).

Hasil Penelitian ini juga menunjukkan bahwa masa depan pariwisata Kawasan Puncak sangat ditentukan oleh sinergi antara kebijakan pemerintah dan praktik pengelolaan destinasi oleh para pengelola lokal. Pemerintah daerah telah mengambil langkah progresif melalui digitalisasi sistem kunjungan, penerapan zonasi, serta pembentukan Destination Management Organization (DMO) sebagai wadah kolaborasi multipihak. Langkah ini selaras dengan tren global pariwisata pasca-2019 yang menekankan pentingnya keberlanjutan, ketahanan, dan transformasi digital.

Dari sisi pengelolaan, para pengelola destinasi mulai beradaptasi dengan inovasi teknologi, misalnya tiket elektronik, sistem antrean digital, serta promosi berbasis media digital. Upaya ini membantu meningkatkan efisiensi manajemen kunjungan sekaligus memperluas daya tarik destinasi. Namun, masih terdapat kesenjangan signifikan, terutama pada pelaku UMKM yang belum sepenuhnya mampu beradaptasi dengan teknologi digital. Kondisi ini berisiko memperlebar ketimpangan manfaat pariwisata jika tidak diimbangi dengan program literasi digital dan dukungan pemerintah. Konsep pariwisata berkelanjutan (sustainable tourism) kini berkembang menuju pariwisata regeneratif (regenerative tourism), yaitu bentuk pariwisata yang tidak hanya mengurangi dampak negatif, tetapi juga berusaha memperbaiki kondisi lingkungan “Kebijakan Pemerintah dalam Sektor Pariwisata” dan sosial. Konsep ini relevan untuk destinasi seperti kawasan wisata Puncak Bogor yang menghadapi tekanan lingkungan akibat overtourism. Pemerintah daerah bersama pengelola destinasi dituntut untuk merumuskan kebijakan dan strategi yang melibatkan masyarakat lokal, memperkuat

kearifan lokal, dan mengintegrasikan teknologi hijau. Studi mutakhir menegaskan bahwa pariwisata regeneratif dapat menjadi solusi jangka panjang yang tidak hanya menjaga keberlanjutan, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal secara nyata (Higgins-Desbiolles et al., 2023).

Dengan demikian, keberhasilan pengembangan kawasan Puncak sebagai destinasi wisata unggulan tidak cukup hanya bertumpu pada regulasi atau inovasi teknologi semata. Masa mendatang pariwisata di kawasan ini menuntut kebijakan publik yang adaptif, berbasis data, serta berpihak pada kepentingan masyarakat lokal, sekaligus praktik pengelolaan yang inklusif dan berkelanjutan. Hasil kajian juga menegaskan bahwa keberhasilan pengelolaan pariwisata di kawasan Puncak tidak dapat dipisahkan dari praktik terbaik yang telah dibuktikan di destinasi lain. Pengembangan homestay berbasis masyarakat (Vany et al., 2024), penerapan komunikasi pemasaran terpadu (Setiawan et al., 2023), serta penguatan brand UMKM lokal (Kurniadjaya et al., 2024) menjadi tiga strategi kunci yang dapat direplikasi. Ketiganya memberikan arah bahwa kebijakan digitalisasi dan tata kelola inklusif di Puncak perlu disinergikan dengan pemberdayaan masyarakat, sehingga pariwisata tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan jumlah kunjungan, tetapi juga keberlanjutan dan keadilan sosial. Kolaborasi erat antara pemerintah, pengelola destinasi, dan komunitas menjadi kunci agar kawasan Puncak tidak hanya bertahan menghadapi tantangan overtourism, tetapi juga mampu bertransformasi menjadi destinasi pariwisata yang adil, hijau, dan kompetitif.

DAFTAR PUSTAKA

- Amore, A. (2025). From governance to meta-governance in tourism : Re-incorporating politics, interests and values in the analysis of tourism governance. In *Handbook of Tourism Governance*. Edward Elgar Publishing.
- Amanah & Munawaroh – Analisis Transformasi Digital dalam Pengelolaan Wisata Religi dan Budaya : Studi Kasus Kesultanan Banten. *Jurnal Manajemen Pariwisata dan Perhotelan*. Bahas aspek digital marketing dan sistem pengelolaan destinasi berbasis teknologi.
- Anggariani & Dharma Paramartha – Digital Tourism Transformation (Virtual Traveling sebagai Solusi Dampak COVID19 pada Sektor Pariwisata di Desa Kampial, Bali. Empowerment. Manfaat VR/virtual traveling untuk memulihkan sektor pariwisata desa pasca COVID19.
- Bramwell, B., & Lane, B. (2020). Towards new perspectives on sustainable tourism governance. *Journal of Sustainable Tourism*, 28(1), 1–8.
- Gössling, S., Scott, D., & Hall, C. M. (2021). Pandemics, tourism and global change: A rapid assessment of COVID-19. *Journal of Sustainable Tourism*, 29(1), 1–20.
- Heliawati & Munawaroh – Peran Teknologi Digital dalam Pengembangan Pariwisata Budaya dan Religi di Banten. *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Manajemen*. Menganalisis dampak digitalisasi terhadap pemasaran dan pengalaman wisatawan di Banten.

- Higgins-Desbiolles, F. (2020). Socialising tourism for social and ecological justice after COVID-19. *Tourism Geographies*, 22(3), 610–623.
- Higgins-Desbiolles, F. (2021). The “war over tourism”: Challenges to sustainable tourism in the tourism academy after COVID-19. *Journal of Sustainable Tourism*, 29(4–5), 551– 569.
- Hidayat dkk. – Digitalisasi Pariwisata Regeneratif: Pengembangan Platform Ecogreen untuk Mendorong Transformasi Bisnis Berkelanjutan di Destinasi Wisata. *Jurnal Ilmu Multidisiplin. Fokus pada platform digital yang mendukung pariwisata ramah lingkungan dan bisnis berkelanjutan*.
- Jamal, T., & Higham, J. (2021). *Justice and ethics in tourism*. Routledge.
- Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. (2023). *Strategic plan 2020 2024*. Kemenparekraf.
- Kurniadjaya, M., Cantona, C. F., Wijaya, A., Chandra, D. R., & Setiawan, B. (2024). Perencanaan dan pengembangan brand oleh-oleh untuk UMKM di Desa Wisata Angsana. *Ikra-Ith Abdimas*, 8(1), 34–42.
- Permana dkk. (2024) – Digital Free Tourism: Strategy for Developing Tourism in Indonesia. *Jurnal Ilmiah Edunomika*. Ulas konsep digital-free tourism untuk destinasi dengan akses internet terbatas—strategi pengelolaan alternatif. OECD. (2020). *Tourism trends and policies 2020*. OECD Publishing.
- Pradiatiningtyas, D., Dewa, C. B., & Safitri, L. A. (2025). Analisis kepuasan pelanggan agen perjalanan online (OTA) aplikasi mobile di Yogyakarta: Pendekatan kuantitatif. *Jurnal Pariwisata Bisnis Digital dan Manajemen*. Retrieved from
- Saputra & Mistriani – Digitaltourism: Opportunities and Challenges for Tourism in Indonesia. *Jurnal Ilmiah Edunomika*. Kajian SWOT konsep digital tourism, termasuk tantangan seperti cybercrime.
- Sandra Yap (2024) – Manajemen Pariwisata di Indonesia: Pendekatan Transformasi Berbasis Blockchain. *Inovasi Pembangunan: Jurnal Kelitbangan*. Bahas penerapan teknologi blockchain untuk transparansi dan efisiensi dalam pengelolaan pariwisata.
- Seraphin, H., Sheeran, P., & Pilato, M. (2020). Over-tourism and the fall of Venice destination. *Journal of Destination Marketing & Management*, 19, 100455.
- Serio, R. G., Giuliani, D., Dickson, M. M., & Espa, G. (2025). Going green across boundaries: Spatial effects of environmental policies on tourism flows. *arXiv*.
- Setiawan, B., Arief, M., Hamsal, M., Furinto, A., & Wiweka, K. (2023). The effect of integrated marketing communication on visitor value and its impact on intention to revisit tourist villages: The moderating effect of propensity to travel. *Calitatea*, 24(194), 319–332.
- Sihombing & Sartika (2025) – Penerapan Smart Tourism sebagai Strategi Transformasi Digital untuk Menarik Wisatawan di Kabupaten Samosir. *Jurnal Ilmiah Teknik Informatika dan Komunikasi*. Teliti bagaimana aplikasi smart tourism meningkatkan daya tarik dan hambatan infrastruktur.
- Sutanto & Setiadi (2019) – Overtourism Sebagai Keniscayaan Dalam Pengelolaan Pariwisata di Indonesia. *Altasia: Jurnal Pariwisata Indonesia*. Mengangkat

- overtourism dan pentingnya pemetaan daya dukung destinasi (contohnya Kebun Raya Cibodas).
- Sumiati, P., & Onsardi, O. (2025). Pengaruh promosi online terhadap peningkatan minat pengunjung di pariwisata Pusat Pelatihan Gajah di Desa Suka Baru. *Jurnal Manajemen Modal Insani dan* Retrieved from
- Tandean & Yulianingsih (2025) – Transformasi Layanan Pariwisata melalui Aplikasi Layanan Penyedia Tour Guide Berbasis Android. *Jurnal JTIK. Fokus pada digitalisasi layanan pemandu wisata, transparansi, dan kualitas servis.*
- UNWTO. (2021). A roadmap for inclusive recovery and green transformation. World Tourism Organization.
- UNWTO. (2022). Tourism and COVID-19: Reviving tourism in a safe and coordinated manner. World Tourism Organization.
- UNWTO. (2023). World tourism barometer. World Tourism Organization.
- WTTC. (2023). Travel & tourism economic impact 2023. World Travel & Tourism Council.
- Vany, J., Priscillia, F., Arifin, M., Deo, C., & Setiawan, B. (2024). Perencanaan dan pengembangan homestay di Desa Wisata Angsana, Desa Setu, Kabupaten Bogor. *Ikra-Ith Abdimas*, 8(1), 57–63.
- Zenker, S., & Kock, F. (2020). The coronavirus pandemic – A critical discussion of a tourism research agenda. *Tourism Management*, 81, 104164.